

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Manajemen Laba**

Manajemen laba dapat didefinisi sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah, yaitu laba. Manajemen laba terjadi karena beberapa alasan, seperti untuk meningkatkan kompensasi, menghindari persyaratan hutang, memenuhi ramalan analisis, dan mempengaruhi harga saham. Manajemen laba merupakan suatu realitas akuntansi akrual yang enggan diterima oleh para pemakai. Meskipun penting untuk diketahui bahwa manajemen laba tidak dilakukan sejauh yang telah dipublikasikan pers keuangan, tidak diragukan bahwa manajemen laba merusak kredibilitas informasi akuntansi [29].

Terdapat tiga jenis pola manajemen laba [30] :

##### **1. Pola Income Minimization**

Pola ini dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan lebih rendah dari laba sebenarnya. Secara praktis, pola ini relatif sering dilakukan dengan motivasi perpajakan dan politis. Agar nilai pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi, manajer cenderung menurunkan laba periode tahun berjalan, baik melalui penghapusan aset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan. Hal ini juga dilakukan untuk motivasi politis. Agar tidak menjadi pusat perhatian yang akan menimbulkan biaya politis yang tinggi, manajer sering kali memilih untuk melaporkan laba yang rendah dari laba yang seharusnya dilaporkan. Contoh motivasi politis ini bisa terjadi pada instansi yang mengharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah atau sumber dana lainnya. Demi menjaga konsistensi bantuan, subsidi, atau resiko diprivatisasi, manajer cenderung menurunkan laba karena khawatir jika kinerja baik, sahamnya akan dijual atau tidak mendapatkan bantuan.

## 2. Pola Income Maximization

Pola ini merupakan kebalikan dari pola *income minimization*. Menurut pola ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya. Teknik yang dilakukan pun beragam. Mulai dari menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan keperiode mendatang, pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, sampai dengan meningkatkan jumlah penjualan dan produksi. Pola ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar mendapat kepercayaan dari kreditor. Hampir semua perusahaan *go public* meningkatkan laba dengan tujuan menjaga kinerja saham mereka.

## 3. Pola Income Smoothing

Pola ini dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba sehingga laba yang dilaporkan relatif stabil. Untuk investor dan kreditor yang memiliki sifat *risk adverse*, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia keuangan, fluktuasi harga saham atau fluktuasi laba merupakan indikator resiko. Demi menjaga agar laba tidak fluktuatif, stabilitasnya harus dijaga. Stabilitas laba ini dapat diperoleh dengan mengkombinasikan dua pola tersebut, yaitu meminimalkan atau memaksimalkan laba.

Rumus untuk menghitung manajemen laba dalam penelitian ini adalah [30] :

Menentukan nilai total akrual dengan formulasi :

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \quad (2.1)$$

Menentukan nilai parameter  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  menggunakan *Jones model* (1991) dengan formulasi :

$$TA_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta R_{evit} + \alpha_3 PPE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2.2)$$

Lalu, semua variable tersebut dibagi dengan aset tahun sebelumnya ( $A_{it-1}$ ), sehingga formulasinya berubah menjadi :

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = a_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + a_2 \left( \frac{\Delta R_{evit}}{A_{it-1}} \right) + a_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it} \quad (2.3)$$

Menghitung nilai NDA dengan formulasi :

$$NDA_{it} = a_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + a_2 \left( \frac{\Delta R_{evit}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta R_{ecit}}{A_{it-1}} \right) + a_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) \quad (2.4)$$

Menentukan nilai akrual diskresioner yang merupakan indikator manajemen laba akrual dengan cara mengurangi total akrual dengan akrual nondireksioner, dengan formulasi :

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it} \quad (2.5)$$

Keterangan :

$TA_{it}$  = Total akrual perusahaan i pada periode t

$NI_{it}$  = Laba bersih perusahaan i pada periode t

$CFO_{it}$  = Arus kas operasi perusahaan i pada periode t

$NDA_{it}$  = Akrual nondiskresioner perusahaan i pada periode t

$DA_{it}$  = Akrual diskresioner perusahaan i pada periode t

$A_{it-1}$  = Total aset perusahaan i pada periode t-1

$\Delta R_{evit}$  = Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada periode t

$\Delta R_{ecit}$  = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t

$PPE_{it}$  = *Property, plant and equipment* perusahaan i pada periode t

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi

$\varepsilon_{it}$  = *Error term* perusahaan i pada periode t

Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan laba atau meminimumkan laba untuk memenuhi tujuan pribadi. Dengan meningkatnya laba perusahaan maka manajer akan mendapatkan bonus atas partisipasinya terhadap perusahaan. Sedangkan menurunnya laba perusahaan akan berdampak buruk bagi perusahaan yaitu dividen perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham akan rendah dan manajer tidak akan mendapatkan bonus atau penghargaan.

### 2.1.2. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan pengungkapan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan menyangkut aspek yang sangat luas, seperti perlindungan terhadap konsumen, pembayaran upah yang wajar kepada karyawan, keselamatan kerja, dukungan kepada

dunia pendidikan, kesehatan, dukungan terhadap lingkungan yang bersih dan hijau, dan sebagainya [28].

Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah banyak perusahaan yang melaksanakan kegiatan sebagai perwujudan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya aturan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, serta telah tumbuh kesadaran dari para pengusaha tentang pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan aktivitas rutin yang dilakukan perusahaan dan menjadi bagian penting dari organisasi perusahaan untuk eksistensinya dalam jangka panjang. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat memperkuat kelangsungan hidup perusahaan, dengan membangun kerja sama diantara *stakeholders* yang difasilitasi oleh perusahaan melalui penyusunan program-program pengembangan masyarakat disekitar perusahaan [28].

Isu mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial sudah berkembang sejak lama, tetapi perhatian dan pelaksanaannya mulai berkembang beberapa tahun terakhir dan dilakukan oleh beberapa perusahaan tertentu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dijabarkan dalam peraturan Menteri BUMN No. 4 Tahun 2007, yang mengatur tentang besaran dana dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi perusahaan BUMN. Selain itu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatannya terkait dengan sumber daya alam diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya [28].

Konsep pengungkapan tanggung jawab sosial saat ini dapat dipandang sebagai titik awal maupun katalisator bagi lahirnya konsep-konsep yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan tanggung jawab sosial. Selain itu, konsep tanggung jawab sosial juga sangat di pengaruhi dan memengaruhi perkembangan lebih lanjut dari konsep-konsep yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial [31].

Indikator pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini adalah mengacu pada indikator GRI. Indikator GRI terdiri dari 91 item pengungkapan fokus pengungkapan. Berikut disajikan tabel pengungkapan tanggung jawab sosial [32]:

Tabel 2. 1 Indikator Tanggung Jawab Sosial Berdasarkan GRI G4

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
Keberadaan di Pasar	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula ( <i>entry level</i> ) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktik Pengadaan	EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi di luar organisasi
	EN5	Intensitas energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
Air	EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
Keanekaragaman Hayati	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
Emisi	EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN <i>Red List</i> dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO) NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> , dan
	EN21	emisi udara signifikan lainnya

Tabel 2.1 Sambungan

Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel <sup>2</sup> lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan atau limpasan dari organisasi
	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
Produk dan Jasa	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Kepatuhan	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
Transportasi	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Lain-lain	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
Asesmen pemasok atas lingkungan	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan		
<b>KATEGORI SOSIAL SUB-KATEGORI : PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA</b>		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan baru dan <i>turnover</i> karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut persentasi dalam perjanjian bersama
	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena
Hubungan Industrial		
Kesehatan dan Keselamatan Kerja		

Tabel 2.1 Sambungan

Pelatihan dan Pendidikan	LA8	penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA9	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
	LA10	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
	LA11	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Persentase karyawan yang menerima reviu kinerja dan pengembangan karier rutin secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
	LA13	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA14	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan	LA15	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA16	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>SUB KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA</b>		
Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non-Diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Praktik Pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-

Tabel 2.1 Sambungan

Asesmen	HR9	hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia
Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
<b>SUB KATEGORI : MASYARAKAT</b>		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
Anti-Korupsi	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
Kebijakan Publik	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan Keptuhan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti-persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>SUB KATEGORI : TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK</b>		
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil

**Tabel 2.1 Sambungan**

Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Dalam pengukuran *corporate social responsibility*, salah satu proksi yang digunakan adalah *Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI)*. *Corporate Social Responsibility* dapat di rumuskan sebagai berikut [31] :

$$CSRDI = \frac{\sum d_i}{n_j} \quad (2.6)$$

Keterangan :

CSRDI = Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan

$\sum d_i$  = Jumlah item yang diungkapkan

$n_j$  = Total item pengungkapan

Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat menimbulkan citra positif di mata masyarakat dan pemerintah serta dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial berkembang ketika terjadi banyak masalah yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya yang dapat menurunkan reputasi perusahaan. Kini perusahaan juga mulai memiliki kesadaran secara sukarela untuk melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut dikarenakan perusahaan sadar bahwa penerapan pengungkapan tanggung jawab sosial akan membawa dampak positif bagi *stakeholders* maupun perusahaan baik dalam menjalankan operasi perusahaan maupun keberlanjutan perusahaan di masa mendatang.

### 2.1.3. Ukuran Perusahaan

Sebuah usaha dapat dibedakan menjadi empat jenis tingkatan. Salah satu faktor penentu tingkatan jenis usaha dapat dilihat berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan jumlah pegawainya. Terdapat beberapa perbedaan untuk mengategorikan suatu usaha masuk ke dalam kategori usaha tertentu [33] :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola dengan mempekerjakan satu sampai empat orang. Biasanya usaha ini merupakan usaha yang baru dirintis dan bersifat rumahan.

2. Usaha kecil

Usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan dengan mengandalkan modal yang cukup kecil, dengan resiko yang tidak besar, yang dapat dilakukan oleh segelintir orang atau masyarakat yang dikelola dengan manajemen sederhana dengan produk berupa barang, jasa, ataupun manufaktur. Menurut UU No. 20 tahun 2008 yang disebut dengan usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) Kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00.

4. Usaha Besar

Berdasarkan undang-undang, usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau jumlah penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha

nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ukuran perusahaan diproksikan dengan *Size* adalah total aset perusahaan. Karena aset biasanya sangat besar nilainya dan untuk menghindari bias skala maka besaran perlu di kompres. Ukuran perusahaan diukur menggunakan *logaritma natural* dari total aset. Total aset dijadikan indikator ukuran perusahaan karena sifatnya jangka panjang dibandingkan dengan penjualan. Maka ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut [34] :

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset}) \quad (2.7)$$

Ukuran perusahaan yang lebih besar mendapatkan tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi karena perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil. Dengan tingkat kepercayaan investor yang tinggi, perusahaan akan memiliki kelangsungan kegiatan usaha yang lebih baik. Perusahaan yang telah lama berdiri akan memiliki aset yang besar, aset perusahaan yang besar memungkinkan manajemen dalam mengembangkan perusahaan kearah lebih baik, baik dalam melakukan manajemen laba sehingga perusahaan dapat memiliki prospek yang baik pada masa yang akan datang. Ukuran perusahaan menjadi tolak ukur dalam membandingkan efektivitas dan penggunaan aset untuk memperoleh penjualan dan laba perusahaan.

#### 2.1.4. Umur Perusahaan

Umur perusahaan berkaitan dengan lamanya perusahaan telah berdiri atau beroperasi. Umur perusahaan juga mengindikasikan seberapa kuat perusahaan dalam menghadapi persaingan dan bertahan dalam industrinya. Semakin lama perusahaan berdiri maka diharapkan perusahaan akan semakin menjadi kinerja yang unggul yang ditandai dengan peningkatan aset dan penjualan perusahaan. Dalam pemilihan keputusan investasi, umur perusahaan merupakan salah satu indikator penilaian oleh pemodal karena memberikan informasi ke pemodal seberapa besar kesempatan investasi yang dapat dimiliki oleh perusahaan [35].

Semakin lama suatu perusahaan beroperasi atau semakin tua usia perusahaan, maka perusahaan tersebut kemungkinan besar akan menyediakan informasi tentang perusahaan yang lebih banyak dan lebih luas daripada perusahaan yang baru berdiri.

Dengan mengetahui umur perusahaan, maka akan diketahui pula sejauh mana perusahaan tersebut dapat *survive* dalam dunia bisnis. Semakin lama atau semakin tua umur perusahaan, maka semakin banyak pengalaman bisnis perusahaan dan semakin perusahaan mengetahui tantangan dan kondisi bisnis yang nyata, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan akan optimal. Usia perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan akan tetap eksis dan mampu bersaing sehingga usia perusahaan dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan [36].

Perusahaan yang telah lama berdiri memiliki pengalaman yang lebih banyak dari pengalaman produksi dan pengalaman yang lebih banyak dalam pengembangan produk. Perusahaan yang telah lama berdiri lebih siap untuk menilai resiko dan manfaat dari memperkenalkan teknologi baru karena memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan kemampuan teknologi. Sementara disisi lain, perusahaan yang baru berdiri lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan organisasi yang akan datang, tetapi mereka memiliki lebih sedikit sumber daya dan memiliki keterampilan pemasaran yang lebih lemah [37].

Dalam penelitian ini umur perusahaan dinyatakan dengan rumus sebagai berikut [38] :

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Perusahaan Berdiri} \quad (2.8)$$

Melalui penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan menunjukkan kemampuan untuk going concern. Umur perusahaan dapat dihitung dengan menselisihkan tahun dilakukannya observasi dengan tahun perusahaan tersebut berdiri. Perusahaan yang telah lama berdiri diasumsikan mampu menghasilkan laba yang maksimal dan memiliki dorongan untuk melakukan praktik manajemen laba untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi dan menjaga kepercayaan dari publik terutama para pemegang saham.

### 2.1.5. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi dan pemegang saham pengendali [39].

Ketentuan mengenai komisaris independen adalah sebagai berikut [39] :

1. Jumlah komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh nonpemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris.
2. Dewan komisaris wajib membuat rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikannya kepada seluruh anggota direksi perusahaan tercatat yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah dewan komisaris menerima laporan akhir hasil penelaahan yang dilakukan oleh komite audit dengan melampirkan hasil penelaahan.
3. Komisaris independen wajib menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahuinya kepada dewan komisaris perusahaan tercatat.  
Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Peraturan OJK tersebut, komisaris independen wajib memenuhi persyaratan berikut [40] :
  1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.
  2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
  3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut ; dan
  4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Peran komisaris independen sangat diperlukan. Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan praktik-praktik akuntabilitas, responsibility, transparansi, *disclosure*, kemandirian, dan praktik keadilan menurut ketentuan yang berlaku. Kepentingan pihak-pihak independen tersebut diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari

benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, serta melindungi kepentingan *stakeholder* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas [25].

Butir I-a dari Peraturan Pencatatan Efek No. 1-A PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT. Bursa Efek Indonesia) mengenai ketentuan umum pencatatan efek yang bersifat ekuitas di bursa mengatur tentang rasio komisaris independen. Dalam butir tersebut dinyatakan bahwa jumlah komisaris independen haruslah secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris [40] :

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota komisaris}} \quad (2.9)$$

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan sangat diperlukan karena keberadaan mereka adalah untuk melindungi kepentingan saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga prinsip kesetaraan. Dewan komisaris independen juga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan sehingga melindungi perusahaan dari resiko tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya.

### 2.1.6. *Leverage*

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang. Dana juga dibutuhkan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha atau investasi baru. Artinya didalam perusahaan harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan [41].

Rasio *leverage* adalah mengukur pembiayaan perusahaan dari sumber utang yang akan berdampak pada kewajiban atau beban tetap. Dengan demikian rasio *leverage* merupakan ukuran seberapa besar perusahaan dibiayai dari unsur utang dan seberapa besar kemampuan perusahaan dari hasil operasi perusahaan untuk melunasi

beban pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman tersebut. Dalam dunia bisnis sekarang hampir tidak ada lagi perusahaan yang semata-mata dibiayai dari modal sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang otomatis didukung dari modal utang seperti dengan melakukan pembelian bahan secara kredit yang menimbulkan munculnya utang dagang dan penangguhan pembayaran upah dan pajak yang disebut akrual. Disamping pembelian kredit, pembiayaan melalui jenis utang lainnya juga semuanya merupakan hasil keputusan pembiayaan yang berakibat pada kewajiban untuk membayar beban tetap, misalnya cicilan pokok, bunga dan kewajiban membayar sewa *leasing* atas barang modal [27].

*Debt to Total Assets Ratio (debt ratio)* yaitu rasio antara total utang dengan total aset yang memberi gambaran seberapa persentase total aset dibiayai dari utang. Ukuran ini sangat berguna bagi para kreditor lama dan calon kreditor untuk menentukan tingkat ongkos/biaya atas tambahan utang baru perusahaan dalam bentuk utang. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar peranan utang dalam membiayai aset perusahaan dan sebaliknya [27].

Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membayarkan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (hutang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa hutang yang layak diambil dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang [42].

Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. Rata-rata industri *debt to asset ratio* yaitu 35%. Jika *debt to asset ratio* perusahaan masih dibawah rata-rata industri maka akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir sepenuhnya hutang [41].

Adapun rumus *debt to total assets* adalah [41] :

$$\text{Debt to total asset ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}} \quad (2.10)$$

*Leverage* yang diukur dengan *Debt to total asset ratio* menunjukkan perbandingan total kewajiban dan total aset dimana merupakan suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang memiliki beban

tetap dengan maksud agar dapat membantu perusahaan dalam mengelolah *equity* dan *debt* di dalam operasi keuangan. Perusahaan dengan *leverage* yang mengakibatkan jumlah hutang yang besar dibandingkan dengan aktiva maka perusahaan diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya.

### 2.1.7. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Para wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin dan juga cenderung untuk melakukan penghindaran memenuhi kewajiban perpajakan sedapat mungkin. *Tax avoidance* merupakan wajib pajak tidak melanggar peraturan undang-undang yang berlaku (*lawfull*). *Tax avoidance* adalah rekayasa "*tax affair*" yang masuk tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan berlaku (*lawfull*) [43].

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*), di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan - kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Resistensi pajak dengan meminimalkan pajak yang terutang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung bertujuan menghindari pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) dalam melakukan penghematan pajak banyak terjadi dalam transaksi-transaksi lintas negara [26].

Perlawanan terhadap (resistensi pajak) yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Ada 2 (dua) jenis perlawanan dalam pajak yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif meliputi adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara

pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak [44].

Penghindaran pajak yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR terdapat pada laporan laba rugi dan *cash tax amount* pada laporan arus kas. Rekonsiliasi antara pajak laba rugi dan pajak arus kas harus di ubah menjadi liabilitas dan pajak tangguhan [45] :

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Tax Amount on the income statement}}{\text{Pre-Tax Income}} \quad (2.11)$$

Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Semakin kecil pajak yang dibayarkan maka laba akan semakin besar. Laba yang besar akan berdampak baik bagi para pemegang saham karena akan mendapatkan dividen yang lebih besar.

### 2.1.8. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Struktur kepemilikan dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan di antara beberapa klaim terhadap suatu perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan [46].

Ketika perusahaan masih berbentuk perusahaan perorangan, masalah keagenan (*agency problem*) tidak mungkin timbul karena pemilik perusahaan adalah juga sebagai manajer perusahaan. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer. Demikian juga pada perusahaan yang berbentuk persekutuan, belum terjadi pemisahan antara pemilik dan manajer

perusahaan secara hukum. Pihak-pihak yang bersekutu untuk mendirikan perusahaan menyetorkan sejumlah dana, dan biasanya sekaligus menduduki fungsi sebagai salah satu manajer perusahaan. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka pemilik tidak mungkin melaksanakan semua fungsi yang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu perusahaan, karena keterbatasan kemampuan, waktu dan sebagainya. Dalam kondisi yang demikian, pemilik perlu menunjuk pihak lain (*agen*) yang profesional, untuk melaksanakan tugas mengelola kegiatan perusahaan dengan lebih baik [28].

Pada perusahaan yang berbentuk perseroan, biasanya telah dilakukan pemisahan antara pemilik dan manajer. Karena adanya pemisahan, tidak bisa dihindari adanya kemungkinan perbedaan kepentingan pemilik dengan pihak manajemen. Pihak manajemen dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri dalam mengelola perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemilik perusahaan. Sebagai contoh, perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi baru. Pemilik perusahaan ingin mengambil peluang investasi tersebut, karena dapat meningkatkan nilai saham perusahaan, tetapi pihak manajemen mungkin tidak berminat, karena jika kondisi berubah menjadi buruk, pihak manajemen dapat kehilangan pekerjaan. Apabila investasi baru tidak dilaksanakan, berarti pemilik kehilangan peluang yang menguntungkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk biaya keagenan [28].

Apabila perusahaan yang sahamnya dimiliki 100% oleh pemegangnya yang sekaligus sebagai manajer, maka manajer pemegang akan berupaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berbeda dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh beberapa orang dan salah satunya sebagai manajer perusahaan. Manajer pemegang tidak lagi berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang model keseluruhan tetapi cenderung mengutamakan kepentingan pribadi misalnya dengan fasilitas yang berlebihan [27].

Maka kepemilikan manajerial dapat di rumuskan sebagai berikut [46] :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{jumlah lembar saham yang dimiliki manajer}}{\text{jumlah lembar saham yang beredar}} \quad (2.12)$$

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal perusahaan yang dikelola. Teori keagenan bisa

dikurangi apabila manajer mempunyai kepemilikan saham didalam perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham manajer di suatu perusahaan maka manajer akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga insentif yang dibagikan akan lebih besar.

## 2.2. Review Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan ringkasan beberapa penelitian terdahulu :

1. Anne Putri, Abdul Rohman, Anis Chariri, melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “*Tax Avoidance, Earnings Management, And Corporate Governance Mechanism (An Evidence From Indonesia)*”. Hasil menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba dan kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan *tax avoidance* terhadap manajemen laba sedangkan dewan komisaris dan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi tidak memberikan pengaruh *tax avoidance* terhadap manajemen laba [20].
2. Arla Aulia Annisa, Dody Hapsoro, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Kualitas Audit, *Leverage* dan *Growth* Terhadap Praktik Manajemen Laba”. Sampel yang digunakan sebanyak 74 perusahaan manufaktur dengan tahun pengamatan 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dan *growth* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba [18].
3. Christine Herawati Limbong, melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Sampel yang digunakan sebanyak 32 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 201-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan umur perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *corporate social responsibility*, sedangkan

*leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility* [12].

4. Clarissa Taco & Ventje Ilat, melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh *Earning Power*, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Sampel yang digunakan sebanyak 30 perusahaan manufaktur dengan tahun pengamatan 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan *earning power*, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba [16].
5. Diny Andriany, Willy Sri Yuliandari, Djusnimar Zutilisna melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan Pengungkapan Media Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Sampel yang digunakan sebanyak 17 sampel perusahaan BUMN Indonesia dengan tahun pengamatan 2014-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan pengungkapan media tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* [9].
6. Eva Rosa Dewi, S.Moh dan Khoiruddin melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan yang masuk dalam JII (Jakarta Islamic Index) tahun 2012-2013”. Sampel yang digunakan sebanyak 38 sampel perusahaan yang masuk dalam JII dengan tahun pengamatan 2012-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba [15].

7. Hayu Wikan Kinasih, Melati Oktafiyani, Lenni Yovita, melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Keterkaitan Antara Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba : Sebuah Perspektif Teori Agency”. Sampel yang digunakan sebanyak 23 sampel pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan CSR, *leverage*, *size* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba [5].
8. Hillary Sumilat & Nicken Destriana, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Sampel yang digunakan sebanyak 152 sampel pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan asing dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, independensi dewan direksi, komite audit, umur perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* [13].
9. Mala Ayu Anggita, Trisandi Eka Putri, Asep Kurniawan, melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “*The Effect Of Tax Avoidance, Earnings Management And Political Connection On Corporate Social Responsibility Disclosure : Indonesian Manufacturing Companies Evidence*”. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*, sedangkan penghindaran pajak dan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* [19].
10. Muhammad Restu, Willy Sri Yulindari & Annisa Nurbaiti, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Komite

Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*". Sampel yang digunakan sebanyak 10 perusahaan dari Indeks SRI-KEHATI yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 2013-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* [14].

11. Ni Ketut Riska Astari & I.D.G Dharma Saputra, melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan Pada Manajemen Laba". Sampel yang digunakan sebanyak 20 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada manajemen laba [7].
12. Ni Made Apsari Dwijayanti & I Ketut Suryanawa, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul "Pengaruh Asimetri Informasi, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Pada Manajemen Laba". Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun pengamatan 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba [23].
13. Nolita Yeni Siregar & Yulis Veronika, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul "Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure*, Diversifikasi Perusahaan, Kompensasi Bonus, dan Kualitas Audit Terhadap *Earnings Management*". Sampel yang digunakan sebanyak 64 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba dan kompensasi

bonus berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan diversifikasi perusahaan dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba [4].

14. Nor Atikah Binti Shafai, Azlan Bin Amran, Yuvaraj Ganesan, melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “*Earnings Management, Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility*”. Sampel yang digunakan sebanyak 806 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa *Earning management* dan *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility*, sedangkan *Managerial Ownership* mampu memoderasi hubungan antara *Earning Management* dan *Tax Avoidance* terhadap *Corporate Social Responsibility* [22].
15. Nur Asiah & Said Muniruddin, melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014)”. Sampel yang digunakan sebanyak 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* sedangkan kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* [8].
16. Patrisia Adiputri Singal melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Sampel yang digunakan sebanyak 40 perusahaan pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi dengan tahun pengamatan periode 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sedangkan kepemilikan asing

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* [24].

17. Putu Tiya Mahawyahrti & I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Asimetri Informasi, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Pada Manajemen Laba”. Sampel yang digunakan sebanyak 39 perusahaan dengan tahun pengamatan 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi, *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba [6].
18. Riky Antonius & Lambok Dr Tampubolon, melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Analisis penghindaran pajak, beban pajak tangguhan, dan koneksi politik terhadap manajemen laba” Sampel yang digunakan sebanyak 228 perusahaan dengan tahun pengamatan 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan Penghindaran Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Koneksi Politik, *Leverage*, Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba [21].
19. Yofi Prima Agustia & Elly Suryani, melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas Terhadap Manajemen laba (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)”. Sampel yang digunakan sebanyak 17 perusahaan dengan tahun pengamatan 2014-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, sedangkan Umur Perusahaan dan *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba [10].
20. Yoremia Lestari Ginting melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Tata Kelola dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan sedangkan variabel lainnya yakni kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan [17].

21. Yunietha & Agustin Palupi, melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Publik Non Keuangan”. Sampel yang digunakan sebanyak 228 data dari 76 perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Disisi lain, *board of director*, *board of independence*, kualitas audit, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, *leverage*, dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba [11].

**Tabel 2. 2 Review Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil yang diperoleh</b>
Anne Putri, Abdul Rohman dan Anis Chariri (2016) [20].	<i>Tax Avoidance, Earnings Management, And Corporate Governance Mechanism (An Evidence From Indonesia).</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Earnings Management</i> <u>Variabel Independen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Moderasi :</u> <i>Corporate Governance Mechanism</i> terdiri dari : a. Kepemilikan institusional b. Dewan komisaris c. komisaris independen	<u>Secara Simultan:</u> <i>Tax avoidance</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. <u>Secara Parsial:</u> 1. <i>Tax avoidance</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. 2. Kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan <i>tax avoidance</i> terhadap manajemen laba 3. Dewan komisaris dan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi tidak memberikan pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap manajemen laba

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Arla Aulia Annisa, Dody Hapsoro (2017) [18].	Pengaruh kualitas audit, <i>leverage</i> , dan <i>growth</i> terhadap Praktik manajemen laba.	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen laba</p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas audit</li> <li>2. <i>Leverage</i></li> <li>3. <i>Growth</i></li> </ol>	<p><u>Secara Simultan:</u> Kualitas audit, <i>leverage</i>, dan <i>growth</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p><u>Secara Parsial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas audit dan <i>growth</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba</li> <li>2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</li> </ol>
Christine Herawati Limbong (2019) [12].	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI	<p><u>Variabel Dependen:</u> Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i></p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas</li> <li>2. <i>Leverage</i></li> <li>3. Ukuran Perusahaan</li> <li>4. Umur perusahaan</li> </ol>	<p><u>Secara Simultan:</u> profitabilitas, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>corporate social responsibility</i></p> <p><u>Secara Parsial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>corporate social responsibility</i></li> <li>2. Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>corporate social responsibility</i></li> <li>3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>corporate social responsibility</i>.</li> </ol>
Clarissa Taco & Ventje Ilat (2016) [16].	Pengaruh <i>Earning Power</i> , Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ).	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen laba</p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Earning Power</i></li> <li>2. komisaris independen</li> <li>3. Dewan direksi</li> <li>4. Komite Audit</li> <li>5. Ukuran Perusahaan</li> </ol>	<p><u>Secara Simultan:</u> <i>Earning Power</i>, komisaris independen, Dewan direksi, Komite audit, Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p><u>Secara Parsial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.</li> <li>2. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.</li> <li>3. <i>Earning Power</i>, komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</li> </ol>

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Diny Andriany, Willy Sri Yuliandhari, Djusnimar Zutilisna (2017) [9].	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pengungkapan Media Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .	<p><u>Variabel Dependen:</u> Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran Perusahaan</li> <li>2. Profitabilitas</li> <li>3. <i>Leverage</i></li> <li>4. Pengungkapan Media</li> </ol>	<p><u>Secara Simultan:</u> Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pengungkapan Media berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>.</p> <p><u>Secara Parsial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></li> <li>2. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pengungkapan Media tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></li> </ol>
Eva Rosa Dewi S, Moh. Khoiruddin (2016) [15].	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap manajemen laba pada perusahaan yang masuk dalam JII (Jakarta <i>Islamic Index</i> ) tahun 2012-2013.	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Laba</p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Institusional</li> <li>2. Kepemilikan Manajerial</li> <li>3. Ukuran dewan komisaris</li> <li>4. Proporsi dewan komisaris independen</li> <li>5. Ukuran komite audit</li> </ol>	<p><u>Secara Simultan:</u> Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, Proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p><u>Secara Parsial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen laba</li> <li>2. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba</li> </ol>

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Hayu Wikan Kinasih, Melati Oktafiyani, Lenni Yovita (2018) [5].	Keterkaitan Antara Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba : Sebuah Perspektif Teori Agency	<u>Variabel Dependen:</u> Manajemen laba  <u>Variabel Independen:</u> 1. CSR 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Size</i> 4. ROA	<u>Secara Simultan:</u> CSR, <i>leverage</i> , <i>size</i> , roa memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba  <u>Secara Parsial:</u> 1. ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba 2. CSR, <i>leverage</i> , <i>size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
Hillary Sumilat & Nicken Destriana (2017) [13].	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility.	<u>Variabel Dependen:</u> Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>  <u>Variabel Independen:</u> 1. Kepemilikan Manajerial 2. Kepemilikan Publik 3. Kepemilikan Asing 4. Independensi Dewan Direksi 5. Komite Audit 6. Ukuran Perusahaan 7. Umur Perusahaan 8. <i>Leverage</i> 9. Profitabilitas 10. Likuiditas	<u>Secara Simultan:</u> Kepemilikan Manajerial, kepemilikan Publik, Kepemilikan Asing, Independensi Dewan Direksi, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> . <u>Secara Parsial:</u> 1. Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> . 2. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, Independensi Dewan Direksi, Komite Audit, Umur Perusahaan, <i>Leverage</i> , profitabilitas dan likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
Mala Ayu Anggita, Trisandi Eka Putri, Asep Kurniawan (2019) [19].	<i>The Effect Of Tax Avoidance, Earnings Management And Political Connection On Corporate Social Responsibility Disclosure : Indonesian Manufacturing Companies Evidence</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Corporate Social Responsibility disclosure</i>  <u>Variabel Independen:</u> 1. Koneksi politik 2. Penghindaran pajak 3. Manajemen laba	<u>Secara Simultan:</u> Koneksi politik, penghindaran pajak dan manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> . <u>Secara Parsial:</u> 1. Koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> 2. Penghindaran pajak dan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Muhammad Restu, Willy Sri Yuliandari & Annisa Nurbaiti (2019) [14].	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<p><u>Variabel Dependen:</u> Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran Dewan Komisaris</li> <li>2. Proporsi Dewan Komisaris Independen</li> <li>3. Ukuran komite audit</li> </ol>	<p><u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, leverage, dan kepemilikan saham publik memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>.</p> <p><u>Secara Parsial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></li> <li>2. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></li> </ol>
Ni Ketut Riska Astari & I.D.G Dharma Saputra (2019) [7].	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan Pada Manajemen Laba	<p><u>Variabel Dependen:</u> 1. Manajemen Laba</p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Manajerial</li> <li>2. Ukuran Perusahaan</li> <li>3. Kinerja Keuangan</li> </ol>	<p><u>Secara Simultan:</u> Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.</p> <p><u>Secara Parsial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Manajemen Laba.</li> <li>2. Kinerja Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba.</li> <li>3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.</li> </ol>
Ni Made Apsari Dwijayanti & I Ketut Suryanawa (2017) [23].	Pengaruh Asimetri Informasi, Kepemilikan Manajerial & Kepemilikan Institusional Pada Manajemen Laba.	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Laba</p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asimetri Informasi</li> <li>2. Kepemilikan Manajerial</li> <li>3. Kepemilikan Institusional</li> </ol>	<p><u>Secara Simultan:</u> Asimetri Informasi, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.</p> <p><u>Secara Parsial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asimetri Informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba.</li> <li>2. Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Manajemen Laba.</li> </ol>

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Nolita Yeni Siregar & Yulis Veronika (2017) [4].	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> , Diversifikasi Perusahaan, Kompensasi Bonus, dan Kualitas Audit Terhadap <i>Earnings Management</i> .	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Earnings Management</i>  <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> 2. Kompensasi bonus 3. Diversifikasi perusahaan 4. Kualitas audit	<u>Secara Simultan:</u> <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> , kompensasi bonus, diversifikasi perusahaan dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba <u>Secara Parsial:</u> 1. <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba 2. kompensasi bonus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba 3. Diversifikasi perusahaan dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
Nor Atikah Binti Shafai, Azlan Bin Amran, Yuvaraj Ganesan (2018) [22].	<i>Earnings Management, Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility</i> .	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Corporate Social Responsibility</i>  <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Earning Management</i> 2. <i>Tax avoidance</i>  <u>Variabel Moderasi:</u> <i>Managerial Ownership</i>	<u>Secara Parsial:</u> 1. <i>Earning Management</i> dan <i>Tax Avoidance</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> . 2. <i>Managerial Ownership</i> mampu memoderasi hubungan antara <i>Earning Management</i> dan <i>Tax Avoidance</i> terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> .
Nur Asiah & Said Muniruddin (2018) [8].	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Corporate Social Responsibility</i>  <u>Variabel Independen:</u> 1. Ukuran Perusahaan 2. Kepemilikan Manajerial 3. Kepemilikan Asing 4. Dewan Komisaris Independen	<u>Secara Simultan:</u> Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing Dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> . <u>Secara Parsial:</u> 1. Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> . 2. Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Patrisia Adiputri Singal (2019) [24].	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	<p><u>Variabel Dependen:</u> Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p><u>Variabel Independen:</u> 1. Kepemilikan Institusional 2. Kepemilikan Manajerial 3. Kepemilikan Asing</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> 1. Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>. 2. Kepemilikan Asing tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>.</p>
Putu Tiya Mahawyahrti & Ayu I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016) [6].	Asimetri Informasi, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Pada Manajemen Laba.	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Laba</p> <p><u>Variabel Independen:</u> 1. Asimetri Informasi 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Asimetri Informasi, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> 1. Asimetri Informasi dan <i>Leverage</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba. 2. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Manajemen Laba.</p>
Riky Antonius, Lambok DR Tampubolon (2019) [21].	Analisis penghindaran pajak, beban pajak tangguhan, dan koneksi politik terhadap manajemen laba.	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Laba</p> <p><u>Variabel Independen:</u> 1. Penghindaran Pajak 2. Beban Pajak Tangguhan 3. Koneksi Politik 4. Ukuran Perusahaan 5. <i>Leverage</i> 6. Profitabilitas</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Penghindaran pajak, beban pajak tangguhan, dan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> 1. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba 2. Penghindaran Pajak, Beban pajak tangguhan dan Koneksi politik, <i>Leverage</i>, Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba</p>

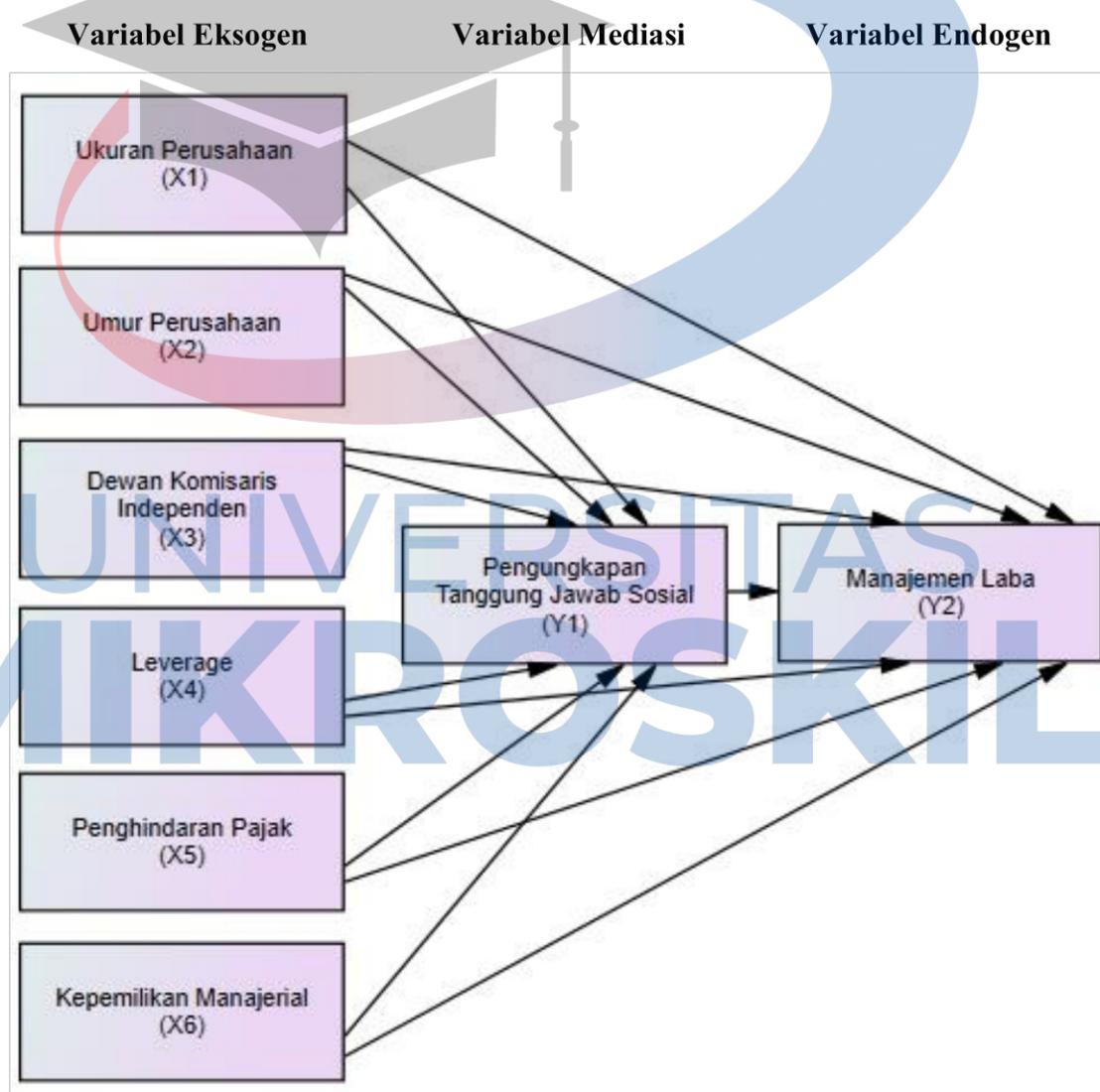
Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Yofi Prima Agustia & Elly Suryani (2018) [10].	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016).	<u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Laba  <u>Variabel Independen:</u> 1. Ukuran Perusahaan 2. Umur Perusahaan 3. <i>Leverage</i> 4. Profitabilitas	<u>Secara Simultan:</u> Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas berpengaruh signifikan Terhadap Manajemen Laba.  <u>Secara Parsial:</u> 1. Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. 2. Umur Perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba.
Yoremia Lestari Ginting (2016) [17].	Mekanisme Tata Kelola dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	<u>Variabel Dependen:</u> Pengungkapan Tanggung Jawab sosial  <u>Variabel Independen:</u> 1. Kepemilikan Institusional 2. Kepemilikan Manajerial 3. Komisaris Independen 4. Komite Audit	<u>Secara Simultan:</u> Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial  <u>Secara Parsial:</u> 1. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. 2. Komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. 3. Kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.
Yunietha, Agustini Palupi (2017) [11].	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba (Perusahaan Publik Non Keuangan).	<u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Laba  <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Board of Director</i> 2. <i>Board of Independence</i> 3. Kualitas Audit 4. Ukuran Perusahaan 5. Kepemilikan Manajerial 6. <i>Leverage</i> 7. Profitabilitas 8. Pertumbuhan Penjualan 9. Umur Perusahaan	<u>Secara Parsial:</u> 1. Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba. 2. <i>Board of Director</i> , <i>Board of Independence</i> , Kualitas Audit, Ukuran perusahaan, Kepemilikan Manajerial <i>Leverage</i> , dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu gambaran pemikiran pengaruh atau hubungan antara suatu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel eksogen adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, *leverage*, penghindaran pajak dan kepemilikan manajerial, serta variabel mediasi adalah pengungkapan tanggung jawab sosial dan variabel endogen adalah manajemen laba.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka kerangka konsep dari penelitian ini adalah :



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Perusahaan yang berukuran besar memiliki tuntutan yang tinggi oleh para *stakeholders* sehingga apabila tuntutan tidak dapat dicapai oleh pihak manajemen, maka pihak manajemen akan melakukan manajemen laba. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba [6]. Perusahaan yang besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial [8]. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosialnya sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba karena perilaku etis perusahaan bertentangan dengan tindakan manajemen laba dan perusahaan akan lebih bertanggung jawab dalam melakukan kebijakan akuntansi

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_1$  : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

### **2.4.2. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Manajemen Laba melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Perusahaan yang telah lama berdiri lebih dapat dipercaya oleh investor karena diasumsikan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang maksimal sehingga untuk memenuhi ekspektasi dari para pemegang saham perusahaan cenderung akan melakukan manajemen laba. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba [10]. Perusahaan yang telah lama berdiri memiliki pengalaman yang lebih banyak dan mengetahui kebutuhan komitmennya tentang perusahaan sehingga perusahaan akan lebih transparan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial [12]. Perusahaan yang telah lama

berdiri akan turut menentukan kepercayaan investor sehingga investor akan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan tersebut. Sehingga semakin banyak informasi yang diketahui oleh masyarakat dan investor maka perusahaan akan mengurangi praktik manajemen laba karena perusahaan tentunya tidak ingin kehilangan kepercayaan dari masyarakat ataupun investor.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

#### **2.4.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Dewan komisaris independen berfungsi sebagai penasehat dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan dan memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan. Sehingga dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba [15]. Semakin besar komposisi dewan komisaris independen maka dapat bertindak semakin objektif dengan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih luas kepada para *stakeholders*nya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial [17]. Semakin besar persentase komisaris independen, maka semakin meningkatnya aktivitas pengawasan terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial untuk mengurangi usaha menutupi informasi perusahaan sehingga dapat memberikan hasil yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

#### **2.4.4. Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi cenderung akan melakukan praktik manajemen laba karena perusahaan terancam bangkrut yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba [10]. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan lebih terdorong untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial karena semakin luas pengungkapan, maka semakin banyak informasi yang diperoleh investor, hal ini dilakukan supaya investor dapat memperoleh keyakinan atas terjaminnya hak mereka sebagai kreditur. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial [9]. Perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan informasi lebih banyak karena posisi hutang yang dimiliki perusahaan tentu bukan menjadi penghalang manajemen untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sehingga hal tersebut dapat menyakinkan kreditur bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan manajemen laba karena perusahaan tentunya dapat membayar utang tepat pada waktunya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : *Leverage* berpengaruh terhadap Manajemen Laba melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

#### **2.4.5. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Manajemen Laba melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Manajemen sengaja menghindari pajak dengan cara meningkatkan beban melalui metode tertentu sehingga laba yang dilaporkan kecil. Penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan menurunkan laba dapat memungkinkan terjadinya manajemen laba. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba [20]. Membayar pajak merupakan sebuah bentuk pengungkapan tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan yang sering melakukan penghindaran pajak cenderung akan

mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mendapatkan pandangan positif dari masyarakat. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial [22]. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial karena dengan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial maka biaya-biaya yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan yang berakibat pada kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan sehingga perusahaan tidak perlu melakukan manajemen laba untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>5</sub> : Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.

#### **2.4.6. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba melalui Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Kepemilikan manajerial menunjukkan besarnya jumlah saham yang dimiliki manajemen perusahaan [11]. Kepemilikan manajerial juga mengurangi ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham, sehingga akan mengurangi praktik manajemen laba. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba [23]. Dengan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen dengan mendukung kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial [24]. Semakin besar kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan, maka manajemen memiliki wewenang untuk turut serta dalam pembuatan dan pengambilan keputusan sehingga bertindak lebih objektif untuk kelangsungan hidup perusahaan dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan citra positif perusahaan dimata masyarakat dan investor sehingga perusahaan akan mengurangi praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>6</sub> : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba melalui  
..... Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

